



TĀ'ŪN

NARASI COVID-19 DI ACEH



Era di mana wabah mematikan kembali menyergap warga dunia. Sebagian menyebut ini konspirasi global, yang lain berkata ini azab dari Tuhan.

Editor:

Arif Ramdan, Fairus, Murizal Hamzah

TĀ'ŪN

■ NARASI COVID-19 DI ACEH

TĀ'ŪN

■ NARASI COVID-19 DI ACEH

Penulis: Alyasa' Abubakar dkk
Editor: Arif Ramdan, Fairus, Murizal Hamzah

Setting/layout: Famnuri
Desain cover: Kang Arif

Copyright @ 2021
oleh Pusat Studi Media dan Agama (Pusmed+A)
dan Bandar Publishing
All rights reserved.

Hak penerbitan ada pada Pusmed+A

Cetakan I, Februari 2021

Diterbitkan oleh Pusmed+A
Jl. Ibnu Sina, Darussalam, Syiah Kuala
Banda Aceh, Indonesia

Bermitra dengan

Bandar Publishing
Banda Aceh

ISBN 978-623-7936-54-1

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Abubakar, Alyasa'

Tā'ūn: Cerita Covid-19 di Aceh/Alyasa' Abubakar dkk; editor, Arif
Ramdan, Fairus, Murizal Hamzah;—Cet. 1, Banda Aceh Pusmed+A; 2021.

xvi + 300 h.; 13 x 20,5 cm

ISBN 978-623-7936-54-1

I. Judul.

II. Arif Ramdan, Fairus, Murizal Hamzah

ṬĀ'ŪN

Isi Buku

Dari Penerbit — *v*

Bukan Sambutan Biasa

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional

Doni Monardo — *vii*

Pelaksana Tugas Gubernur Aceh

Nova Iriansyah — *ix*

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Fakhri — *xi*

Kepala Pusat Studi Media dan Agama (Pusmed+A) UIN Ar-Raniry

Fairus — *xv*

Direktur Bandar Publishing

Mukhlisuddin Ilyas — *xvii*

Memilih “Takdir Allah”

Al Yasa’ Abubakar, Prof. Dr. — 1

Ṭā’ūn dalam Lintasan Sejarah Umat Islam

M. Hasbi Amiruddin, Prof. Dr. — 15

Cocoklogi Corona

Arif Ramdan — 23

Local Wisdom Menghadapi Ṭā’ūn

Ayah Pantan — 29

Ikhtiar Masa Covid-19

Azman — 37

Lockdown vs Lock Gong

Hasan Basri M. Nur — 45

Wabah dan Respons Masyarakat dalam Manuskrip Aceh

Hermansyah – 52

Suara-suara Covid-19

Ahmad Husein – 58

Jihad TNI Perangi Covid-19

Husni El-Ibrahimi – 65

New Human

Fairus M. Nur Ibrahim – 73

Memahami Respons Masyarakat Menghadapi Covid-19

Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad – 82

Anakronisme Perspektif dalam Mitigasi Covid-19

Mijaz Iskandar – 91

Pengurangan Risiko Bencana Corona

Munawar AR – 99

Masyarakat Aceh dan *Social Distancing*

Rasyidah – 107

Manusia dan Corona: Antara Buih dan Gelombang Bencana

Reza Idria – 117

Ritual Tolak Bala

Sakdiah – 125

Sikap Muslim di Saat Wabah

Muhammad Yasir Yusuf – 131

Menguji Kedaulatan Ekonomi Negara

Zainuddin T – 138

Saat untuk Radikal

Fahmi Yunus – 145

Membaca Covid-19 di Media

Samsuar – 149

Trending Topik Virus pada Media Massa

Anhar Fajri — 155

Corona Sang Bintang Iklan

Asmaunizar — 160

Gempuran Berita Hoaks -

Syahril Furqany — 166

Media Berkabar Pemirsa Bersabar

Ulfa Khairina — 171

Ketika Corona Mengepung Kita

Eka Srimulyani, Prof. Dr. — 177

Bahasa Tubuh Saat Corona

Ade Irma — 182

Agam Panyoet Era Covid-19

Azhari — 187

Siklus Hidup Semasa *Lockdown*

Hanifah — 193

Perubahan Psikososial Masyarakat

Ismiati — 199

Penebar Cemas Abad-21

Jarnawi — 206

Kepanikan Global

Juhari Hasan — 211

Bukan Dewa-19

T. Lembong Misbah — 217

Dinamika Desa Menghadapi Covid-19

Mirza Fanzikri — 222

Gaya Hidup Anticorona

Muhammad Haris Riyaldi — 227

Solidaritas Masyarakat Aceh

Nurul Husna – 232

Imunitas: *Resources* yang Terlupakan

Sabirin – 238

Disabilitas dan Kerentanan Berlapis

Syaifullah Puteh – 246

Peran Seimbang Pasutri di Masa Pandemi

Usfur Ridha – 251

Vandekmi dan Kopi Pahit

Sehat Ihsan Shadiqin – 257

Layanan “Kayangan” Kisah Karantina di Malaysia

Ainun Mardhiyah binti Ahmad Bukhari – 265

Corona Versus Warung Kopi

Fachrur Rizha – 271

Kembali ke Wuhan

Fadil – 278

KPM Dari Rumah Inovatif: Pengabdian di Masa Covid-19

Mukhlisah – 283

Logistik Covid-19

Murizal Hamzah – 289

Gundah di Pasai

Yuswardi Mustafa – 294

Partial Lockdown di Perancis

Zia Faizurrahmany El Faridy – 299

Para Penulis – 306

MASYARAKAT ACEH DAN *SOCIAL DISTANCING*

Oleh: Rasyidah

Pendahuluan

Istilah *social distancing*, atau disebut juga *physical contact*, pada prinsipnya adalah menjaga jarak fisik atau *physical distancing*. *Social distancing* bertujuan mengurangi atau menghalangi transmisi wabah (termasuk COVID-19) dalam masyarakat dengan meminimalkan kontak fisik antara individu yang berpotensi terinfeksi dan orang sehat, atau antara kelompok dengan tingkat penularan tinggi dan kelompok yang tanpa atau tingkat penularan rendah.¹

Social distancing adalah penanganan bencana pandemic bidang Komunikasi Resiko dan Pemberdayaan Masyarakat (KRPM), yang diadopsi dari panduan WHO tentang *Risk Communication and Community Engagement*². KRPM menggunakan strategi yang melibatkan masyarakat dalam kesiapsiagaan dan respon serta mengembangkan intervensi yang dapat diterima dan efektif untuk menghentikan penyebaran wabah yang semakin meluas serta dapat melindungi individu dan komunitas.³ *Social distancing* menjadi harapan terbesar untuk mengurangi percepatan penyebaran Covid 19. Hanya saja penerapan *social distancing* ini tidak sesederhana seperti yang tertulis, karena pembatasan sosial pastinya bersentuhan dengan seluruh dimensi kehidupan masyarakat.

Social distancing di Aceh punya tantangan tersendiri, karena ciri masyarakatnya yang khas. Masyarakat Aceh memiliki 1001 acara ritual kebersamaan (seperti *kandoeri*). Negeri ini juga punya 1001 warung kopi yang mengakar di keseharian masyarakat. Nilai keacehan juga identik dengan Islam. Masjid dan meunasah selalu hidup dengan aktifitas sosial keagamaan. Menghimbau untuk dibatasi, serta merta menimbulkan kecurigaan masyarakat. Sebagiannya menganggap ada upaya untuk melemahkan umat Islam, lalu muncul resistensi.

Gambaran konteks Aceh menunjukkan bahwa penerapan *social distancing* bukanlah hal sederhana, sementara pelaksanaannya sangat penting. Dengan latar belakang inilah, maka tulisan ini mencoba memahami masyarakat dan *social distancing* di Aceh. Apa dan bagaimana hal ini bagi mereka, dan bagaimana sikap mereka meresponnya. Kajian ini berangkat dari penelitian sederhana dengan mewawancari 73 narasumber penelitian di beberapa kabupaten kota di Aceh. Pengumpulan data dilakukan pada 28 Maret–4 April 2020, dibantu oleh 33 mahasiswa mata kuliah Participatory Rural Appraisal (PRA), Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UINAR.

Social distancing

Pada kajian Sosiologi, konsep *social distance* telah intensif digunakan sejak 100 tahun lalu (pertengahan 1920-an) terkait relasi antar kelompok etnis, agama dan ras. Dimana berbagai perbedaan tersebut dapat menimbulkan jarak sosial di antara kelompok yang berbeda.⁴ Sementara dalam kesehatan istilah ini digunakan sebagai tindakan untuk meminimalisir kontak antara inidividu dalam rangka mengurangi transmisi penyakit dan ancaman bagi layanan kesehatan.⁵

Sebagai upaya yang melibatkan masyarakat, *social distancing* sangat tergantung pada seberapa patuh masyarakat terhadap kebijakan ini. Targetnya adalah terkendalinya penyebaran wabah hingga kurvanya tidak meningkat cepat dengan ketinggian dan besaran puncak yang tidak sebanding dengan kemampuan penanganan medis. Anies Baswedan, Gubernur Jakarta menyebutkan bahwa salah satu penyebab besarnya angka kematian adalah karena terlambatnya ODP mendapatkan penanganan medis. Hal ini karena penyebaran wabah corona yang sangat cepat.⁶

Kajian terdahulu terhadap penanganan pandemi influenza, dan pengalaman penanganan COVID-19 di Cina, menunjukkan bahwa penerapan sejak dini “pembatasan jarak sosial” secara tegas, cepat, terkoordinasi dan komprehensif cenderung lebih efektif dalam memperlambat penyebaran virus daripada tindakan yang lamban. Diprediksi, jika serangkaian intervensi non-medis, termasuk *social distancing*, telah dilakukan satu minggu, dua minggu, atau tiga minggu sebelumnya di Cina, maka dapat diprediksi jumlah kasus COVID-19 bisa dikurangi sebesar 66%, 86%, dan 95%, dan secara signifikan mengurangi jumlah daerah yang terkena.⁷

Indonesia mengatur *social distancing* sebagai himbauan kepada masyarakat melalui peraturan Menteri Kesehatan. Khusus bagi beberapa daerah dengan jumlah kasus tinggi ditetapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). PSBB merupakan kebijakan yang lebih tegas untuk memaksa masyarakat disiplin.⁸ Harapan terbesarnya, masyarakat menyadari dan mematuhi *social distancing* untuk kebaikan bersama.

Social distancing di Masyarakat Aceh

Situasi nasional dengan kebijakan yang cepat berubah, menunjukkan paniknya situasi Negara dalam mencari alternatif penanganan COVID 19. Hal ini juga terjadi di Aceh. Kepanikan khususnya terjadi di perkotaan, pasca mencuat berita bertambahnya pasien terjangkit COVID 19 di Jakarta. Kota Banda Aceh sempat mengeluarkan kebijakan jam malam, dan penutupan warung serta toko, tapi beberapa hari kemudian kebijakannya dicabut kembali. Beberapa desa di Aceh Besar sempat melakukan *partial lockdown*, namun kemudian Bupati memerintahkan untuk membukanya. Kabupaten Gayo Lues

menghimbau putera daerahnya yang menuntut ilmu untuk tidak pulang kampung, namun karena kondisi semakin tidak jelas, lalu menyediakan fasilitas karantina bagi masyarakatnya yang akan pulang. Beberapa kabupaten juga melakukan *partial lock down* untuk membatasi lintas keluar masuknya orang asing ke wilayah mereka. Beberapa desa menutup gerbang masuk desa dengan palang yang di cor mati, namun kemudian palang ini dibuka kembali karena justru menyulitkan penduduknya. Lalu ada kasus masyarakat yang baru kembali dari kabupaten lain di Aceh, ditolak oleh masyarakat di kompleknya. Tidak ada mekanisme karantina desa, tapi ada penolakan untuk masyarakat yang baru kembali. Kepanikan masyarakat adalah efek psikis bencana. Tapi “luka sosial” karena tindakan yang panic justru berat dampaknya.

Akan tetapi di sisi lain, semangat solidaritas kolektif mulai mengalir dari banyak kelompok. Baik organisasi, maupun masyarakat mulai menggerakkan donasi untuk kelompok rentan yang terdampak secara social ekonomi akibat bencana COVID 19.

Secara umum, setidaknya ada 3 kategori respon masyarakat terhadap himbauan *social distancing*. Pertama, masyarakat yang mematuhi himbauan *social distancing*. Kedua, masyarakat yang paham *social distancing*, tapi karena beberapa kondisi tidak bisa mematuhi, namun tetap berusaha menjaga. Ketiga, masyarakat yang kurang peduli.

Kategori pertama umumnya adalah masyarakat pengakses informasi, baik dari kalangan medis maupun non medis. Umumnya juga ada di wilayah perkotaan. Sementara kategori kedua adalah masyarakat yang kebutuhan ekonominya tergantung dengan pekerjaan yang berhubungan dengan banyak orang. Sehingga mau tidak mau mereka harus berinteraksi langsung, namun tetap mengupayakan jarak aman, masker, dan lainnya. Kelompok ini tergolong banyak, mengingat pemerintah juga belum mampu sepenuhnya memberikan kompensasi ekonomi untuk membantu keluarga rentan. Ini pulalah alasan mengapa *social distancing* masih sebatas himbauan. Sementara kategori ketiga adalah masyarakat yang kurang peduli dengan himbauan. Hal inilah yang akan dieksplorasi lebih detail dalam pembahasan berikut, yaitu situasi yang mempengaruhi kurang pedulinya masyarakat.

Corona Menurut Immunnya Masyarakat

Pengetahuan ini menjadi alasan beberapa masyarakat tidak begitu peduli dengan berbagai himbauan terkait *social distancing*. Entah kapan mulainya, masyarakat selalu punya pengetahuan yang terinternalisasi dengan cepat, termasuk terkait corona. Pengetahuan kolektif ini dapat membentuk opini publik yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Anwar Arifin menyebutkan: pada masyarakat demokrasi, opini publik merupakan kekuatan keempat setelah tiga kekuatan lainnya dalam teori Trias Politika Montesqueu.⁹

Di antara pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat: pertama, Corona hanya terjadi di daerah kota saja. Pengetahuan ini berkembang di pedesaan, berimplikasi pada

kurang pedulinya masyarakat dengan himbauan *social distancing*. Ibu Mb dari Kluet Selatan Aceh Selatan (35 thn) menyebutkan: “ada egoisme dalam diri masyarakat bahwa kasus Corona ini pasti sulit terjadi di sekitaran kita, karena ini hanya terjadi di daerah kota saja.” Hal ini juga disampaikan oleh Pak Sn dari Singkil: “itukan virus adanya di kota-kota besar dan virus itu hanya menyerang orang-orang yang punya penyakit dalam, seperti penyakit paru-paru misalnya, sesak nafas.

Pengetahuan kedua adalah: Corona hanya menyerang non muslim. Pak My 53 tahun dari Abdya menyebutkan: “masyarakat sebagian beranggapan: ‘*tok awak kafe yang keneng corona, tanyoe umat Islam na tacok ie sembahyang sabebe, jadi insyaallah hana keneng*’ (artinya: hanya orang kafir/non muslim yang bisa terkena Corona, kita orang Islam selalu berwudhu’ jadi insyaAllah tidak. Hal senada disampaikan juga oleh Pemuda Ry (25 thn) di Jantho Aceh Besar.

Pengetahuan lainnya terkait: panasnya suhu di Aceh membuat Corona kecil kemungkinan bertahan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh As 43 tahun dari Blang Pidie Aceh Barat Daya, menurutnya: wabah corona ini adalah virus yang tidak bisa terkena panas dan virus ini lebih cepat tersebar di daerah yang dingin, kalau Aceh kan suhunya sangat panas kadang mencapai 37°C walaupun kita atau masyarakat Aceh yang lain terkena covid-19 ini, berarti ini sudah takdir ataupun kehendak dari Sang Pencipta makhluk.

Pengetahuan lainnya: *social distancing* dianggap hanya merugikan dan tidak perlu di Aceh karena tidak ada kasus. Pengetahuan ini terutama berangkat dari masyarakat yang mata pencahariannya sangat tergantung dengan interaksi dengan banyak orang, seperti pedagang, jasa dan penghasilannya bersifat harian. Ibu Ss dari Tangse Pidie (29 thn) menyebutkan bahwa *social distancing* ini sangat menghambat aktivitasnya dia berpendapat: “lagi pula tidak ada satupun masyarakat yang positif terjangkit virus corona, yang ada ini hanya mengganggu aktivitas keseharian saja, dan seharusnya tidak perlu melakukan *social distancing*”. NI dari Tangse (30 thn) juga menegaskan ini. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bu As dari Blang Pidie (43 thn); “kami belum yakin dan percaya karena belum ada bukti nyata di depan mata kami. Sejauh ini yang kami lihat di daerah kami aman-aman saja, tidak ada ODP ataupun PDP covid-19 di daerah kami, dan insya Allah wabah virus corona ini tidak akan masuk ke gampong kami kecuali ada orang yang baru pulang dari Malaysia ataupun dari manapun.” Ibu Ra dari Kuala Batee Blang Pidie (47 thn) juga menyebutkan sosial distancing tidak di perlukan karena sejauh ini aman saja, terlebih lagi tempat iya berkerja terpaksa menghentikan aktivitas karena *social distancing*.

Pengetahuan masyarakat di atas, juga berkembang di media social, lalu mendapat tempat di masyarakat Aceh setelah melalui *taukid* dari actor social yang terpercaya di masyarakat. Bisa jadi orang tua terhadap anaknya, atau guru, atau tokoh agama dan tokoh masyarakat. Masyarakat Aceh adalah masyarakat *paternalistic* yang sangat merujuk pada

pendapat figure rujukannya, umumnya tokoh agama atau teungku. Sehingga peran teungku menjadi krusial untuk meluruskan pengetahuan masyarakat.

Corona dan Keyakinan Masyarakat

Keyakinan yang dimaksudkan di sini adalah nilai-nilai keislaman yang diyakini masyarakat terkait bencana Corona. Di antara keyakinan, pertama: masyarakat meyakini bahwa Allah selalu akan melindungi, sehingga Corona tidak akan berdampak di Aceh. (wawancara Pak An, 35 thn dari Sigli).

Kedua juga diyakini bahwa Aceh adalah tanah istimewa karena banyak “*aulia*”¹⁰ sebagai “*labang nangroe*” (paku/pelindung negeri). Menurut pak Wy (49 tahun) di Darul Imarah Aceh Besar: “kalau saya tidak beraktivitas atau bekerja maka saya tidak bisa membawa pulang makanan dan menurut saya kalau di Aceh insya Allah akan Allah lindungi karena di Aceh banyak *aulia-aulia* Allah sebagai *labang nangroe* (pelindung negeri).

Ketiga yang paling banyak disebut sebut masyarakat yang diteliti adalah: kematian di tangan Allah dan semua sudah ada ketentuannya. Bu Ir 38 thn dari Singkil menyebutkan: saya tidak bisa jalani *social distancing* yang pertama karena factor ekonomi, karena kalau kami menjaga jarak bagaimana kami mencari uang dan bekerja. Yang kedua, kematian ada ditangan Allah, semua sudah diatur sama yang diatas. Lebih jelas lagi hal ini diungkapkan oleh Pak Um (73 tahun) dari Padang Tiji-Pidie, yang menyebutkan bahwa penyakit adalah ciptaan Allah SWT, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan karena semua itu telah diatur dan kehidupan kita juga sudah diatur, jadi ketika pemerintah mengeluarkan peraturan untuk *social distancing*, tentunya para masyarakat di daerah ini menolak. Pak Um menceritakan bahwa beberapa tahun yang lalu tepatnya di tahun 1962 dan 1976, kejadian yang sama seperti ini pernah terjadi, hanya nama penyakitnya yang berbeda, jadi ketika dikaitkan dengan kejadian yang sekarang mereka tambah yakin bahwa peraturan yang di terapkan pemerintah tidak akan merubah apapun kecuali atas kehendak Allah SWT. Pak Um menyesalkan kejadian sekarang, karena tempat ibadah dimana kita panjatkan doa dan meminta pertolongan kepada Allah SWT sekarang mulai kosong dan bahkan kalau dulu selesai sholat kita bisa berzikir tapi sekarang jangankan berzikir untuk berdoa saja tidak bisa, karena akan diusir oleh pengurus masjid. Kalau dulu menurutnya, ketika ada bencana musibah besar seperti ini kita pasti melakukan sholat berjamaah dan berdoa bersama di dalam masjid bahkan kalau dulu orang-orang di kampung melakukan zikir keliling kampung demi mengusir musibah atau penyakit tersebut. Dan menurutnya pemerintah seharusnya membuat peraturan tanpa menyeleweng dari adat atau kebiasaan tertentu yang di lakukan masyarakat apabila terkena musibah atau penyakit tersebut. (wawancara 2 April 2020).

Keyakinan masyarakat yang disebutkan di atas, beberapanya cenderung Jabariyah. Tidak dipungkiri, warisan nilai yang tertuang dalam falsafah Aceh di Hadih Maja pun menciptakan konstruksi teologis yang berjalan di antara dua kutub ekstrim, yaitu Jabariyah (*fatalisme*) dan Qadariyah (*free will*).¹¹ Sehingga kecenderungan untuk fatalis, dapat saja mengemuka. Ketika bencana Tsunami memporak porandakan Aceh, banyak pihak mempertanyakan daya tahan psikis masyarakat Aceh yang kuat. Pada saat itu spirit kejabariyahan berada pada tempat yang tepat, sehingga terbangun kesadaran menerima semua kehendak Allah. Saat ini kejabariyahan ini dipertanyakan posisinya mengingat manusia dituntut untuk berikhtiar menghindarinya.

Pada kondisi bencana corona ini, proses negosiasi teologis yang terkonstruksi di masyarakat mengarah sepihak, yaitu “berserah kepada Allah karena semua sudah ditaqdirkan. Padahal beberapa hadist dan pendapat ulama terdahulu menegaskan untuk menghindari wabah. Hanya saja informasi ikhtiar menghindari wabah ini tidak terbangun sama kuat dengan konstruksi teologis yang berserah pada taqdir Allah. Sehingga muncul sikap acuh dan cenderung sepele dengan himbauan *social distancing*.

Diantara anjuran dalam Islam untuk berikhtiar dan menghindari wabah, dapat dipelajari dari satu kisah masa Umar, disebutkan:

Khalifah Umar beserta para Sahabat dalam perjalanan dinas menuju Syam (Suriah), lalu terdengar berita bahwa wabah penyakit sedang melanda negeri itu, maka para Sahabat berselisih pendapat apakah meneruskan perjalanan ke sana atau balik pulang ke Madinah. Panglima tentara waktu itu adalah Jenderal Abu ‘Ubaydah bin al-Jarrah. Maka Khalifah Umar mengumpulkan para Sahabat senior untuk bermusyawarah. Khalifah Umar minta pendapat tokoh-tokoh senior dari kalangan Sahabat Muhajirin. Mereka sepakat menyarankan agar Khalifah Umar membatalkan kunjungan dan putar balik ke Madinah. Lalu beliau pun berseru: “Wahai rombongan sekalian, aku bersiap untuk berangkat pulang, maka bersiaplah”. Jenderal Abu ‘Ubaydah berkata: “**Apakah kita lari dari takdir Allah?**” Maka Khalifah Umar menjawab: “**Benar, kita lari dari takdir Allah yang satu menuju takdir Allah yang lain.** Bukankah jika engkau menggembala unta akan memilih tanah yang subur daripada tanah yang kering tandus?”¹²

Beberapa hadist juga menyebutkan untuk tidak mendatangi negeri yang sedang dilanda wabah, dan penduduknya juga untuk tidak keluar dari negeri yang sedang di landa wabah.¹³ Ini pula mengapa dalam hadist disebutkan orang yang meninggal karena wabah menjadi syahid. Karena ikhtiarnya untuk tidak meninggalkan negerinya yang akan mengakibatkan meluasnya wabah ini. Tidak meninggalkan daerah yang berwabah dan tidak memasukinya, ini sama artinya dengan *partial lock down*.

Dengan demikian, maka perlu adanya netralisir negosiasi teologi agar menjadi *balance*, dan tidak condong pada spirit kejabariyahan saja. Sehingga keyakinan pertolongan dan kehendak Allah menjadi amalan hati, yang harus disinergiskan dengan amalan anggota badan untuk berikhtiar menghindari taqdir Allah yang satu (wabah) menuju taqdir Allah yang lain (sehat).

Peraturan Ngaret dan Budaya Aceh

Selain beberapa pengetahuan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, persoalan peraturan ngaret dan budaya, juga memiliki kaitan dengan tidak seriusnya masyarakat dalam mematuhi himbauan *social distancing*. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa pengawasan pemerintah, khususnya perangkat gampong masih lemah. Mahasiswa Bm, 20 tahun, dari Nagan Raya menyebutkan: “peraturan yang dibuat oleh pemerintah masih belum sepenuhnya dijalankan dengan benar atau “peraturan karet”, tidak ada tindakan keras.” Hal senada juga disampaikan narasumber lainnya dari Jantho, Abdya dan Aceh Selatan. Masyarakat juga menyesalkan Pemerintah yang ambivalen karena tidak membatasi penerbangan sehingga terus saja ada yang berdatangan dari luar Aceh (In, 23 thn dari Pidie). Selain itu Pak PA (28) dari Susoh Abdya mengesalkan control peraturan yang ngaret antar agama, mengapa hanya masjid saja yang dilarang ini dan itu, tapi di gereja kok tidak berlaku. Menurut Pak Nz (28 thn) dari Samadua Aceh Selatan: “ngaretnya penerapan himbauan ini menyebabkan masyarakat menilai bahwa hal ini tidak terlalu penting. Bu Gm dari Lawe Alas Aceh Tenggara menyebutkan bahwa kebijakan *social distancing* ini belum berjalan optimal sebab banyak aparatur pemerintah yang belum melakukan *social distancing*, bahkan menolak. Maka dari itu masyarakat menolak kebijakan itu, harus nya pemerintah memberi contoh.”

Selain ngaretnya pengawasan, budaya ngopi di Aceh ternyata juga menjadi alasan. Salah satu yang sulit dihentikan adalah kebiasaan masyarakat khususnya laki laki untuk duduk di warung sambil ngopi. Jadi istilah ngopi bukan sekedar minum kopi, tapi ada makna kolektifitas ketika ngopi di tempat yang dipilih. Sehingga menghentikannya menjadi sangat sulit. Ketika Banda Aceh meminta warung-warung tutup, diantara komentar media sosial yang ramai adalah “pahitnya mulut” karena tidak ngopi. Ngopi bagi masyarakat Aceh menjadi budaya yang mengakar. Secara kolektif maupun personal, masyarakat punya *historical taste* tersendiri. Ry (28 thn) Jantho menyebutnya sebagai “kebiasaan yang mendarah daging”.

Di antara hal lainnya yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap *social distancing* adalah kehidupan sosial yang tinggi di pedesaan. Bu Ja (26 thn) dari Aceh Barat menyebutkan, “kalau masyarakat yang tinggal di kampung atau pedesaan susah untuk mematuhi *social distancing*, karena rasa sosial masih kuat, masih tinggi, beda sama yang tinggal di perkotaan”. Pak Am (35 tahun) dari Kluet Tengah menambahkan bahwa kalau *social distancing* diterapkan di desa kita bisa di cap sok atau sombong karena kurang berinteraksi.

Ruang sosial Aceh telah mengkonstruksi wadah, nilai dan keterikatan pada kesepakatan sosial yang kuat. Sehingga pengawasan sebagai control sosial yang diharapkan oleh masyarakat menjadi rule, akan memperluas spectrum kepatuhan secara sosial. Akan tetapi di sisi lain masyarakat punya simbol-simbol kebersamaan seperti gotong royong di pedesaan, dan warung kopi yang bertolak belakang dengan tuntutan *social distancing*.

Sehingga hanya kesadaran yang kuat terkait bencana Corona yang akan mampu mengstagnankannya untuk sementara.

Penutup

Sebagai penutup, ada lima hal yang mempengaruhi masyarakat Aceh yang acuh dan menolak *social distancing* (selain alasan ekonomi) adalah: 1) pengetahuan yang salah tentang bencana corona; 2) keyakinan teologis yang cenderung *fatalistic* yang menganggap semua sudah ada ketentuannya, termasuk kena Corona atau tidak; 3) pengawasan yang ngaret yang membuat masyarakat menilai ini tidak penting; 4) budaya ngopi; 5) Ikatan sosial yang tinggi di wilayah pedesaan, sehingga membatasi kontak sosial, rentan mendapat stigma berlebihan dan sombong.

¹ European Centre for Disease Prevention and Control, *Guidelines for The Use of Non-Pharmaceutical Measures to Delay and Mitigate The Impact of 2019-nCoV*, (Stockholm: ECDC, 2020).

² Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*, Revisi Ke-4, Maret 2020, hal.81

³ *Ibid.*, hal.89

⁴ I.Jane Kidwell and Alan Booth, Social Distance and Intergenerational Relations, *Jurnal The Gerontologist*, Vol. 17, No. 5, 1977, hal 412, diakses dari <https://academic.oup.com/gerontologist> pada 4 April 2020

⁵ *Ibid.*,

⁶ Warta Ekonomi.co.id, Jakarta, 2 April 2020, diakses dari <https://id.investing.com/news/economy/anies-ke-wapres-banyak-yang-terlambat-dideteksi-1973451>, pada 18 April 2020

⁷ European Centre for Disease Prevention and Control, “*Guidance...*”, hal.3

⁸ Peraturan Menteri Kesehatan RI No.9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

⁹ Trias politica yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif, lalu menurut Anwar yg keempat adalah opini public. Lihat Anwar Arifin, *Dakwah Kontemporer Sebuah Studdi Komunikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal.207-208

¹⁰ Aulia dalam masyarakat Aceh adalah istilah bagi ulama ulama terdahulu yang telah meninggal dalam memperjuangkan Islam.

¹¹ Lukman Hakim, “Konstruksi Teologis Dalam Hadih Maja”, *Jurnal Substantia*, Vol. 15, No. 1, April 2013, hal.23

¹² Ibn Hajar, *Fath al-Bari bi-syarh Shahih al-Bukhari*, (Riyadh: t.p., 1421/2001), juz 10, hal .189-

¹³ *Ibid.*, hal .189-190